

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik adalah suatu bidang atau aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan, pengambilan keputusan, dan pengaturan masyarakat (Anam, 2019a). Secara umum, politik meliputi proses pembentukan kebijakan, pengaturan dan pembagian kekuasaan, serta pengarahan sumber daya dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Tujuan utama dari politik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat dan menjaga rasa aman dalam sistem pemerintahan (Al-Hamdi, 2023a). Aspek-aspek utama dalam politik meliputi Pengambilan Keputusan. Politik melibatkan proses pengambilan keputusan tentang isu-isu penting, seperti kebijakan publik, hukum, dan regulasi yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat (Luerdi, 2023a).

Identitas politik adalah fenomena politik yang muncul ketika kelompok-kelompok masyarakat mengidentifikasi diri mereka berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, atau faktor-faktor lainnya, dan kemudian menggunakan identitas ini sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Syam et al., 2020). Politik identitas seringkali menjadi hal yang kompleks karena dapat mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Wijaya Mulya & Schäfer, 2023a). Di Indonesia, politik identitas

telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan politik dan sosial dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini memiliki keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang kaya, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan beragam agama yang diakui. Keanekaragaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan dalam upaya menjaga kesatuan dan keharmonisan di antara berbagai kelompok masyarakat(Drexler, 2022).

Identitas jelas merupakan sesuatu yang sering kita dengar. Selain itu, ini adalah konsep di mana sesuatu didefinisikan sebagai dasar. Orang mengenali Anda ketika mereka tahu identitas Anda. Ini juga berarti bahwa jika kita mengenali suatu identitas, kita memiliki informasi tentangnya. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik keragaman(Wijaya Mulya & Schäfer, 2023a). Biopolitik didasarkan pada perbedaan yang muncul dari perbedaan tubuh.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, budaya dan bahasa lokal. Misalnya, Papua sendiri memiliki 252 suku dengan bahasanya masing-masing. Hanya dari segi keragaman budaya (pluralisme) hal ini dapat dikatakan sebagai prestasi sejarah yang sangat berharga jika Indonesia dapat bertahan lama(Syam et al., 2020). Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai politik identitas yang sering muncul dalam sejarah modern Indonesia harus dikelola dan dikawal dengan bijak oleh penalaran sejarah yang tepat dan cerdas. Saat awal proklamasi, jumlah penduduk

Indonesia kurang lebih 70 juta; sekarang, pada awal abad ke-21, jumlahnya sekitar 250 juta, lebih dari tiga kali lipat sejak 1945, dan merupakan negara terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Agama dan budaya yang berbeda, masyarakat Indonesia dapat saling menghormati dan mentolerir perbedaan yang ada (D. Lestari, 2019).

Politik identitas sendiri merupakan penyempurnaan identitas politik yang diterima warga berdasarkan orientasi politiknya (Y. S. Lestari, 2018). Politik identitas lahir dari kelompok sosial yang merasa dilecehkan dan didiskriminasi. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya politik identitas. Munculnya politik identitas dalam dinamika politik Indonesia yang sangat beragam tidak terlepas dari ketidakadilan dan kesetaraan yang dituntut oleh masing-masing kelompok atau kelas sosial tertentu. Apalagi perbedaan yang menjadi ukuran utama kebhinekaan Indonesia menyebabkan politik identitas Indonesia semakin menekankan perbedaan tersebut. Mengabaikan konflik sebagai basis politik identitas yang berbeda menciptakan instabilitas negara.

Demokrasi Indonesia sendiri pada dasarnya masih dinamis dengan isu-isu kebhinekaan yang sering menimbulkan disharmoni antar kelompok. Perbedaan karena keragaman Indonesia telah mencatat sejarah sebagai faktor penting dalam menciptakan konflik seperti agama, suku, etnis, dan lain-lain. Konflik-konflik tersebut semakin berkembang tidak hanya sebagai konflik antar satu identitas, tetapi memasuki babak

baru sebagai konflik antar identitas. Perluasan konflik antar identitas ini sering kita jumpai dalam konteks proses demokratisasi (Haboddin, 2012). Konsep demokrasi yang seharusnya berlaku dalam kehidupan bernegara, namun kebebasan penuh yang ditawarkan demokrasi di Indonesia saat ini telah menimbulkan gejolak terus-menerus, juga tanpa ragu menyentuh keyakinan kelompok agama. Ketidakepakatan dan pendapat antar agama merupakan bagian integral dari urusan politik saat ini.

Politik identitas di Indonesia banyak menuai pro dan kontra baik itu dari kelompok agama, suku, ras, partai politik dan lain sebagainya. Contohnya peristiwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 telah menjadi fenomena dan menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat DKI Jakarta tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Kasus penistaan Alquran Q.S. Al-Maida [5]: 51 salah satu pasangan calon (Paslon) membangkitkan semangat keberagaman umat Islam sehingga aksi damai 212 berubah menjadi aksi protes di Jakarta, partai yang sangat luar biasa. Aksi damai 212 di Jakarta mencontohkan eratnya hubungan antara agama (Islam) dan politik (negara) sebagai bentuk politik identitas yang begitu kuat sehingga DKI Jakarta terbentuk Pilkada 2017 (Yuristiadhi et al., 2020).

Oleh karena itu penulis merasa penting untuk mengkaji politik identitas di Indonesia dalam pandangan Syariah untuk menarik benang merah dari perbedaan yang ada untuk menciptakan stabilitas politik tetap ada (Samosir & Novitasari, n.d.). Sebuah negara dengan asal-usul yang

beragam Indonesia telah menunjukkan keragaman sejak kemerdekaan kesatuan yang ada dapat dipertahankan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik identitas di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Syariah terhadap politik identitas di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun peneelitan ini bermaksud untuk:

1. Untuk memahami perkembangan politik identitas yang ada di Indonesia.
2. Memahami politik identitas dalam pandangan Syariah untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia sebagaimana mestinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara teoritis**

- a. Memperoleh pengesahan yang merupakan salah satu kebutuhan untuk studi sarjana di Fakultas Agama Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Dapat memahami politik identitas dalam pandangan Syariah untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia yang berjalan sebagaimana mestinya.

## **2. Secara praksis**

- a. Bagi penulis bermanfaat untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang politik identitas dalam pandangan Syariah.
- b. Menjadi wadah referensi bagi pembaca yang fokus terhadap isu politik identitas. Utamanya pandangan syariah pada politik identitas.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah maka penulis menggunakan penulisan yang sistemik sebagai berikut.

Bab I : Yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tinjauan pustaka meliputi landasan teori, dan penelitian terdahulu

Bab III : Berisikan metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV : Berisi hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan, analisis politik identitas di Indonesia

Bab V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Cakupan kajian ini meliputi wilayah-wilayah di Indonesia pada umumnya yang mengekspresikan politik identitasnya. Namun para ulama khususnya akan banyak membahas tentang politik identitas yang terjadi selama Pilkada DKI di Jakarta, sehingga dapat menarik pandangan syariah dari fenomena politik identitas yang berbeda di daerah Indonesia. Secara khusus, peneliti membatasi lokasi penelitian dengan memilih wilayah DKI Jakarta sebagai fokus pembahasan yang banyak mengungkap politik identitas(Nego, 2020).